



Kebijakan Tarif Ekspor Tinggi Amerika Serikat dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia: Suatu *Narrative Review*

Tosan Surya Adi¹, Bhenu Artha²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Yogyakarta, Indonesia¹

Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia²

*Email Korespodensi: bhenoz27@gmail.com

Diterima: 23-02-2026 | Disetujui: 03-03-2026 | Diterbitkan: 05-03-2026

ABSTRACT

The United States' protectionist policies, culminating in the "Liberation Day" announcement on April 2, 2025, have significantly altered the global trade landscape. This research aims to analyze the U.S. high export tariff policy and its substantive impact on the Indonesian economy using a narrative review method. The results indicate that the implementation of a 32% tariff on Indonesian products poses serious macroeconomic challenges, particularly for the textile, electronics, furniture, and palm oil sectors. The palm oil sector recorded a 22.5% decrease in export value, while national GDP growth is projected to slow from 5.20% to 5.03%. Theoretically, U.S. policies are driven by neo-mercantilist views utilizing domestic legal instruments (Sections 301 and 232) to justify protectionism on national security grounds. Indonesia responds through a five-pillar strategy encompassing trade diplomacy, market diversification via RCEP, and regulatory reforms to enhance manufacturing competitiveness. This study concludes that structural transformation toward high value-added economies is crucial for Indonesia to navigate global economic fragmentation and the erosion of the multilateral trading system.

Keywords: Export Tariff; Indonesian Economy; Market Diversification; Narrative Review; Protectionism.

ABSTRAK

Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang memuncak pada pengumuman "Liberation Day" April 2025 telah mengubah lanskap perdagangan global secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tarif ekspor tinggi Amerika Serikat dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan adalah narrative review terhadap literatur dan data ekonomi terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia memberikan tantangan makroekonomi serius, terutama pada sektor tekstil, elektronik, furnitur, dan minyak kelapa sawit. Sektor minyak kelapa sawit mencatat penurunan nilai ekspor hingga 22,5%, sementara pertumbuhan PDB nasional diproyeksikan melambat dari 5,20% menjadi 5,03%. Secara teoretis, kebijakan AS didorong oleh pandangan neo-merkantilis yang menggunakan instrumen hukum domestik (Bagian 301 dan 232) untuk membenarkan proteksionisme dengan alasan keamanan nasional. Indonesia merespons tantangan ini melalui strategi lima pilar yang meliputi diplomasi perdagangan, diversifikasi pasar ke kawasan ASEAN melalui RCEP, serta reformasi regulasi untuk meningkatkan daya saing manufaktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi struktural menuju ekonomi bernilai tambah tinggi sangat krusial bagi Indonesia dalam menghadapi fragmentasi ekonomi global dan melemahnya sistem perdagangan multilateral.

Katakunci: Diversifikasi Pasar; Narrative Review; Perekonomian Indonesia; Proteksionisme; Tarif Ekspor.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Adi, T. S., & Artha, B. (2026). Kebijakan Tarif Ekspor Tinggi Amerika Serikat dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia: Suatu Narrative Review. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 774-784. <https://doi.org/10.63822/p2932k42>

PENDAHULUAN

Kebijakan tarif merupakan instrumen fundamental dalam perdagangan internasional yang digunakan negara untuk melindungi industri domestik dan mencapai tujuan strategis. Sejarah Amerika Serikat (AS) menunjukkan dinamika yang berkelanjutan antara liberalisasi perdagangan dan proteksionisme. Secara teoritis, evolusi kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara pasar bebas dan perlindungan industri dalam negeri. Perspektif neo-merkantilist modern yang diadopsi AS mengasumsikan bahwa ekspor harus ditingkatkan sementara impor dibatasi demi menekan defisit perdagangan.

Transformasi kebijakan ini menjadi sangat agresif sejak era "America First" pada administrasi Trump pertama, yang kemudian dilanjutkan secara selektif oleh administrasi Biden. Puncaknya terjadi pada kembalinya Donald Trump ke kepresidenan (Trump 2.0) dengan pengumuman tarif timbal balik komprehensif pada 2 April 2025, yang dikenal sebagai "Liberation Day" (Harithas et al., 2025). Kebijakan ini menetapkan tarif dasar untuk seluruh negara, termasuk penerapan tarif sebesar 32% terhadap produk-produk asal Indonesia.

Bagi Indonesia, kebijakan ini merupakan tantangan makroekonomi yang serius. Sektor-sektor utama seperti tekstil, minyak kelapa sawit, elektronik, dan furnitur mengalami hambatan akses pasar yang signifikan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada penurunan daya saing harga, tetapi juga mengganggu stabilitas nilai tukar dan menurunkan minat investasi global di Indonesia. Proyeksi ekonomi menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan PDB Indonesia dari 5,20% menjadi 5,03% akibat kebijakan proteksionisme ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tarif ekspor tinggi Amerika Serikat dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia dengan metode *narrative review*.

TINJAUAN TEORI

Kebijakan tarif merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam perdagangan internasional yang telah digunakan oleh negara-negara untuk melindungi industri domestik dan mencapai tujuan ekonomi strategis. Sejarah Amerika Serikat menunjukkan perkembangan yang dinamis dalam pendekatan terhadap liberalisasi perdagangan versus proteksionisme. Dalam konteks teoritis, evolusi kebijakan perdagangan AS mencerminkan keseimbangan berkelanjutan antara liberalisme perdagangan bebas dan proteksionisme (Hong, 2025). Pada masa awal pembentukan negara, pemikir ekonomi seperti Alexander Hamilton mengusulkan tarif tinggi dan dukungan industri untuk melindungi industri-industri yang sedang berkembang, menetapkan fondasi untuk proteksionisme awal Amerika.

Perspektif mercantilist yang mendasari banyak kebijakan tarif AS modern mengandung asumsi bahwa ekspor harus ditingkatkan sambil impor dibatasi untuk menciptakan surplus perdagangan dan mengakumulasi kekayaan nasional. Kebijakan ini sering diklaim sebagai mekanisme untuk mengurangi defisit perdagangan bilateral dan melindungi pekerjaan domestik dari kompetisi asing. Namun, analisis ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa manfaat jangka pendek dari tarif sering diimbangi dengan biaya jangka panjang yang signifikan. Kebijakan proteksionisme yang dipertahankan dalam jangka waktu lama menghasilkan inefisiensi ekonomi serta volatilitas pasar yang mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan balasan, sehingga mengurangi efisiensi pasar secara keseluruhan (Chen, 2025).

Teori perdagangan klasik, khususnya model keunggulan komparatif David Ricardo, menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Namun, penelitian

terbaru menunjukkan bagaimana tarif mengganggu asumsi inti dari model ini, mendistorsi pembagian kerja internasional berbasis keunggulan komparatif (Liu, 2025). Ketika tarif diimplementasikan secara unilateral, mereka menciptakan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya global dan mengurangi kesejahteraan konsumen melalui peningkatan harga, sambil dengan paradoks mengurangi surplus perdagangan yang dimaksudkan untuk ditingkatkan melalui kebijakan proteksionisme (Zaye, 2025).

Kerangka teori ekonomi politik mendalam menunjukkan bahwa kebijakan tarif tidak hanya didorong oleh perhitungan ekonomi rasional tetapi juga oleh faktor-faktor domestik seperti tekanan politik, preferensi konstituen, dan persepsi terhadap ancaman ekonomi eksternal. Kebijakan tarif difungsionalisasikan sebagai alat untuk mengelola konflik geopolitik, mengalihkan investasi modal, dan memposisikan ulang struktur industri global dalam menghadapi kompetisi teknologi yang intens, khususnya dengan China (Huang, 2025). Dinamika ini mencerminkan pandangan neo-merkantilist yang menganggap perdagangan sebagai permainan *zero-sum* di mana keuntungan satu negara sama dengan kerugian negara lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *narrative review*, seperti yang telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya (Byrne, 2016; Sarkar & Bhatia, 2021; Sukhera, 2022). Penelitian ini menganalisis kebijakan tarif ekspor tinggi Amerika Serikat dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Kebijakan Tarif Amerika Serikat di Era Kontemporer

Transformasi kebijakan tarif AS menjadi semakin jelas sejak administrasi Trump pertama (2017-2021) mulai mengimplementasikan strategi "America First" yang secara fundamental mengubah lanskap perdagangan internasional. Kebijakan ini ditandai dengan penggunaan Bagian 232 dan 301 dari undang-undang perdagangan AS untuk menerapkan tarif besar-besaran, awalnya menargetkan baja, aluminium, dan produk China secara luas (Hammond & Burkhart, 2026). Berbeda dengan pola perdagangan liberal yang mendominasi era pasca-Perang Dunia II, administrasi Trump mengadopsi pendekatan unilateral yang mengabaikan komitmen multilateral dan menggantinya dengan negosiasi bilateral.

Dampak ekonomi dari gelombang tarif pertama ini telah terbukti signifikan dan kompleks. Model keseimbangan umum yang komprehensif menunjukkan bahwa tarif unilateral AS yang luas berpotensi mengurangi PDB AS antara 0,23% hingga 0,57% secara tahunan dalam tarif rata-rata 20% (R. Koopman, 2025). Administrasi Biden mempertahankan banyak tarif yang diimplementasikan pada masa Trump sambil secara selektif menambahkan pembatasan baru pada produk dan teknologi strategis. Namun, perubahan kebijakan paling dramatis terjadi dengan kembalinya Donald Trump ke kepresidenan pada tahun 2025 (Trump 2.0), di mana administrasi mengumumkan tarif timbal balik komprehensif pada tanggal 2 April 2025 (dijuluki "Liberation Day"). Tarif-tarif ini lebih luas dalam jangkauan dibandingkan dengan implementasi sebelumnya, menerapkan tarif dasar untuk semua negara dengan tarif tambahan yang bervariasi untuk mitra perdagangan spesifik, termasuk tarif 32% pada produk Indonesia (Lowell et al., 2025).

Pendekatan tarif timbal balik Trump 2.0 didasarkan pada pemahaman bahwa tarif AS saat ini kurang mencerminkan tarif perdagangan mitra, dengan tujuan untuk "meratakan" kondisi perdagangan. Model simulasi dampak ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan tarif universal Trump secara signifikan mengganggu pasar global dan aliran perdagangan, dengan analisis terhadap skenario tarif spesifik negara menunjukkan bahwa pendekatan targeted mungkin akan diadopsi karena menciptakan dampak inflasi yang lebih rendah (Mckibbin et al., 2025). Pergeseran ini menandai kontribusi signifikan terhadap fragmentasi ekonomi global dan mengubah permainan perdagangan internasional yang telah berlaku selama puluhan tahun.

Mekanisme Determinasi Bea Ekspor Tinggi Amerika Serikat

Landasan hukum untuk determinasi tarif tinggi oleh Amerika Serikat berakar pada kerangka peraturan domestik yang memberikan fleksibilitas substansial kepada otoritas eksekutif. Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan 1974 dan Bagian 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan 1962 menjadi alat utama yang digunakan untuk membenarkan penerapan tarif berdasarkan klaim keamanan nasional atau praktik perdagangan yang tidak adil (Zirpoli, 2025). Mekanisme ini mengizinkan Presiden untuk mengambil tindakan unilateral tanpa persetujuan Kongres dalam banyak kasus, meskipun praktik ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang konformitasnya dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Analisis hukum terhadap kebijakan tarif AS menunjukkan kompleksitas dalam menentukan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional. Meskipun WTO memungkinkan pengecualian keamanan nasional, interpretasi AS terhadap "keamanan nasional" telah diperluas secara signifikan untuk mencakup pertimbangan ekonomi dan geopolitik yang luas (Zirpoli, 2025). Proses determinasi tarif melibatkan investigasi oleh badan seperti U.S. International Trade Commission (USITC) dan negosiasi dengan negara-negara mitra, namun semakin banyak keputusan tarif dibuat melalui pengumuman langsung dari Gedung Putih tanpa proses investigasi tradisional yang ketat.

Logika ekonomi di balik determinasi tarif tinggi sering disajikan sebagai respons terhadap defisit perdagangan bilateral yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa AS telah mempertahankan defisit perdagangan dengan mayoritas mitra dagangnya, dengan defisit terbesar terjadi dengan China. Studi menunjukkan bahwa tarif, sambil diklaim dapat mengurangi defisit perdagangan, sebenarnya memiliki efek terbatas dalam mencapai tujuan ini karena dampak negatifnya terhadap ekspor AS dan perubahan pola perdagangan global (Gagnon, 2025). Penelitian empiris menunjukkan bahwa ketika AS menerapkan tarif impor, ekspor AS juga mengalami penurunan seiring negara mitra melakukan tindakan balasan dan mencari pasar alternatif.

Proses determinasi juga dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan persaingan teknologi dengan China. Strategi AS berfokus pada pembatasan akses ke teknologi tinggi dan produk manufaktur strategis, bukan hanya pada manfaat perdagangan murni (Huang, 2025). Ini mencerminkan pergeseran dari penggunaan tarif semata-mata sebagai instrumen regulasi pasar ke penggunaannya sebagai alat kontrol geopolitik dalam konteks kompetisi kekuatan besar. Kombinasi kerangka hukum domestik yang fleksibel, pertimbangan ekonomi yang luas, dan kalkulasi geopolitik menciptakan sistem di mana determinasi tarif tinggi dapat dijustifikasi melalui berbagai argumen yang sering bertentangan dengan praktik dan komitmen multilateral yang telah mapan.

Dampak pada Perekonomian Indonesia

Indonesia, sebagai ekonomi berkembang yang sangat terintegrasi ke dalam perdagangan global dan menjadi mitra dagang signifikan AS, menghadapi dampak substantif dari kebijakan tarif tinggi AS. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tarif timbal balik 32% yang diterapkan AS pada produk Indonesia mulai Februari 2025 secara langsung mengganggu sektor-sektor ekspor utama, termasuk tekstil, minyak kelapa sawit, furnitur, elektronik, dan komoditas pertanian (Bachtiar et al., 2025). Analisis ekonometrik dengan data time-series dari 2010 hingga 2024 menunjukkan bahwa tarif impor AS yang lebih tinggi secara negatif mempengaruhi ekspor Indonesia, memperburuk defisit perdagangan bilateral.

Dampak spesifik pada sektor minyak kelapa sawit Indonesia sangat mengkhawatirkan, mengingat pentingnya komoditas ini bagi ekonomi nasional. Tarif 32% terhadap minyak kelapa sawit Indonesia menyebabkan penurunan nilai ekspor sebesar 22,5% (GEODIS, 2026). Tarif tidak hanya mengurangi daya saing harga produk Indonesia tetapi juga mengganggu aliran perdagangan, mengurangi kepercayaan investor, dan melemahkan daya tarik rantai nilai global di Indonesia. Reorientasi pasar ekspor, khususnya diversifikasi ke pasar alternatif seperti pasar regional ASEAN, menjadi strategi penting namun memerlukan waktu dan investasi yang signifikan.

Pada tingkat makroekonomi yang lebih luas, proyeksi menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS dengan Indonesia dalam 2025 diprediksi mencapai US 28,091 miliar (Bachtiar et al., 2025). Meskipun ini terlihat sebagai pengurangan defisit bagi AS, konsekuensinya bagi Indonesia jauh lebih merugikan. Analisis path menunjukkan bahwa tarif impor yang lebih tinggi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai variabel mediasi, termasuk keseimbangan perdagangan, nilai tukar, serta impor dan ekspor AS (Purba et al., 2025). Tarif yang lebih tinggi mengurangi volume ekspor Indonesia, membatasi akses pasar asing, dan mendistorsi stabilitas nilai tukar, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan dan menekan pertumbuhan PDB.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 0,17%, dengan pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,20% menjadi 5,03% (Bachtiar et al., 2025). Sektor manufaktur berbasis ekspor, khususnya tekstil, produk elektronik, dan furnitur, mengalami tekanan kompetitif yang paling signifikan. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) di industri tekstil Indonesia paling terpuak oleh kebijakan proteksionisme AS (Lectard, 2023). Selain dampak langsung pada volume perdagangan, kebijakan tarif AS menghasilkan ketidakpastian kebijakan yang meningkat, menyebabkan revisi anggaran investasi perusahaan ke bawah dan penundaan proyek ekspansi. Dampak ini tersebar ke seluruh ekonomi melalui pengurangan permintaan input, penurunan keuntungan perusahaan, dan akhirnya pengurangan lapangan kerja dan daya beli konsumen.

Respons dan Strategi Mitigasi Indonesia

Menghadapi tekanan substantif dari kebijakan tarif AS yang agresif, pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan sektor swasta telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang komprehensif. Respons awal fokus pada diplomasi perdagangan dan perundingan bilateral untuk mencoba meringankan dampak tarif (Galuh, 2025). Indonesia berusaha untuk kembali bernegosiasi dengan AS, mengajukan kasus untuk pengecualian tarif berdasarkan dampak ekonomi yang tidak proporsional terhadap negara berkembang yang menyediakan bahan baku penting untuk ekonomi AS.

Strategi diversifikasi pasar ekspor menjadi prioritas utama dalam respons jangka menengah

Indonesia. Indonesia secara aktif memperluas akses pasar non-tradisional ke Asia, Afrika, dan Timur Tengah sebagai pengganti pasar AS yang menyusut (Harianto, 2025). Implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan penggunaan preferensi perdagangan yang sudah ada dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Free Trade Agreements lainnya menjadi komponen kunci dari strategi ini. Namun, diversifikasi pasar yang efektif memerlukan investasi infrastruktur ekspor yang signifikan, pembangunan kapasitas logistik, dan penyesuaian produk untuk memenuhi standar pasar baru.

Penguatan kapasitas manufaktur domestik dan peningkatan nilai tambah produk menjadi strategi transformasi struktural yang lebih dalam. Pemerintah Indonesia meluncurkan strategi lima pilar yang mencakup diplomasi perdagangan, diversifikasi pasar, reformasi regulasi, dukungan fiskal, dan perjanjian layanan perdagangan digital (GEODIS, 2026). Investasi dalam industri pemrosesan domestik, khususnya untuk produk bernilai tambah tinggi seperti industri kimia dari minyak kelapa sawit, furnitur finishing, tekstil fashion, dan elektronik berkualitas tinggi, dirancang untuk menggeser Indonesia dari menjadi pengeksport bahan baku mentah menjadi pengeksport produk manufaktur bernilai tinggi. Strategi ini selaras dengan upaya pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia namun memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.

Respons juga mencakup reformasi regulasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan daya saing ekspor. Integrasi manajemen pelabuhan dalam strategi pemerintah untuk mengatasi dampak kebijakan tarif timbal balik AS menjadi semakin penting, dengan fokus pada pengurangan waktu keluaran barang dari pelabuhan, peningkatan efisiensi logistik, dan koordinasi antar instansi pemerintah (UN Trade and Development (UNCTAD), 2024). Perbaikan dalam infrastruktur perdagangan dan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintah diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari perjanjian perdagangan yang sudah ada dan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai lokasi manufaktur alternatif bagi perusahaan yang mencari diversifikasi dari China. Kemudian, Indonesia juga mengeksplorasi peluang untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara yang tidak dikenai tarif tinggi oleh AS, menciptakan aliansi perdagangan baru yang mengurangi ketergantungan pada pasar AS secara keseluruhan.

Implikasi Jangka Panjang dan Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan tarif tinggi AS menciptakan implikasi jangka panjang yang mendalam tidak hanya untuk Indonesia tetapi untuk seluruh sistem perdagangan global. Fragmentasi ekonomi global menjadi realitas yang meningkat seiring dengan eskalasi perlindungan perdagangan dan pembalasan antar negara. Analisis menunjukkan bahwa perdagangan unilateral yang komprehensif dapat mengurangi PDB AS sebesar 23% dalam jangka pendek dan menurunkan lintasan pertumbuhan jangka panjang sebesar 0,4-0,7 poin persentase setiap tahun (R. B. Koopman & Tsigas, 2025). Namun, efek global bahkan lebih mengganggu, dengan gangguan rantai pasokan global, peningkatan harga konsumen, ketidakstabilan pasar keuangan, dan realokasi perdagangan yang menciptakan pemenang dan pecundang yang tidak merata di seluruh ekonomi berkembang.

Studi prospektif menunjukkan bahwa skenario tarif yang lebih tinggi secara signifikan mengurangi perdagangan manufaktur global dan hasil pertanian, dengan negara-negara yang bergantung pada ekspor menghadapi kemunduran pertumbuhan terukur. Model simulasi tarif universal menunjukkan bahwa China mengalami kerugian kesejahteraan sebesar 1,28% dengan penurunan PDB 0,39%, sementara negara-negara

ASEAN seperti Indonesia mengalami dampak yang lebih halus namun tetap negatif melalui gangguan rantai nilai global (Handoyo & Isnadi, 2023). Implikasi jangka panjang termasuk pergeseran permanen dalam pola perdagangan global, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di pasar berkembang, dan kemungkinan peningkatan ketidaksetaraan dalam dan antar negara.

Kemunduran multilateralisme dan lemahnya otoritas WTO dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan menjadi konsekuensi institusional yang signifikan. Analisis menunjukkan bahwa sistem perdagangan berbasis aturan yang telah berkembang sejak Perang Dunia II mengalami erosi substansial, dengan meningkatnya kasus di mana negara-negara mengambil tindakan unilateral yang tidak konsisten dengan kewajiban WTO (Akhtar et al., 2024). Hilangnya kepercayaan dalam kerangka multilateral ini menciptakan ketidakpastian tinggi bagi pelaku bisnis dan membuat perencanaan jangka panjang menjadi lebih sulit. Solusi alternatif melalui perjanjian perdagangan regional dan bilateral menjadi semakin penting, seperti yang ditunjukkan oleh upaya Indonesia untuk memanfaatkan RCEP dan kerjasama regional lainnya.

Rekomendasi kebijakan untuk Indonesia mencakup pendekatan multidimensi yang menggabungkan respons jangka pendek dengan transformasi struktural jangka panjang. Dalam jangka pendek, Indonesia harus memprioritaskan diplomasi perdagangan yang konsisten dan strategis, termasuk pembentukan koalisi dengan negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa untuk memberikan tekanan kolektif bagi reformasi kebijakan AS (Nathanael, 2025). Penghapusan hambatan regulasi nontarif melalui negosiasi bilateral dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat membantu Indonesia melindungi hak perdagangannya, meskipun efektivitasnya tergantung pada kesediaan AS untuk menerima keputusan WTO.

Dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia harus mempercepat transformasi ekonomi yang mendasar menuju ekonomi bernilai tambah tinggi dengan diversifikasi pasar yang nyata. Ini memerlukan investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan produktivitas, pengembangan infrastruktur yang mendukung manufaktur berkualitas tinggi, dan pembangunan ekosistem startup dan teknologi (Alvares et al., 2025). Penguatan kapasitas pertanian dan agroindustri dengan fokus pada produk organik, berkelanjutan, dan bernilai tinggi dapat membuka pasar premium di negara-negara yang tidak mengenakan tarif tinggi. Implementasi peningkatan digital dalam logistik perdagangan, rantai pasokan, dan proses ekspor dapat meningkatkan efisiensi operasional yang mendorong daya saing tanpa harus melalui persaingan harga mentah.

Secara strategis, Indonesia harus memperdalam integrasi dengan ekonomi regional ASEAN dan memperkuat keterlibatan dengan pasar-pasar berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Keberhasilan diversifikasi pasar diukur tidak hanya dalam hal peningkatan volume tetapi juga dalam hal stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang dari hubungan perdagangan baru (Montes Ninaquispe et al., 2024). Pemerintah harus mempertimbangkan pembentukan dana stabilisasi untuk melindungi sektor-sektor yang terkena dampak dari fluktuasi pasar yang tiba-tiba, sambil mengalokasikan dana public untuk mendukung transisi pekerja dari industri yang menurun ke sektor-sektor pertumbuhan baru. Terakhir, Indonesia harus memposisikan dirinya sebagai negara yang mendukung sistem perdagangan berbasis aturan dan multilateralisme, berkontribusi pada reformasi WTO yang membuatnya lebih efektif, dan berpartisipasi aktif dalam membentuk arsitektur perdagangan global yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Kebijakan tarif ekspor tinggi yang ditetapkan Amerika Serikat, terutama dalam gelombang pertama (Trump 1.0), berkelanjutan di era Biden, dan diperpanjang secara signifikan dalam administrasi Trump 2.0 (2025), mencerminkan pergeseran fundamental dalam pendekatan AS terhadap perdagangan internasional. Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini didorong oleh kombinasi defisit perdagangan bilateral yang berkelanjutan, persaingan teknologi dengan China, dan pertimbangan keamanan nasional yang diperluas. Namun, dampak ekonomi nyata menunjukkan bahwa manfaat domestik, jika ada, sangat kecil dan tidak seimbang dengan biaya global yang tersebar, khususnya bagi ekonomi berkembang yang sangat bergantung pada ekspor seperti Indonesia.

Indonesia menghadapi tantangan perekonomian yang signifikan akibat kebijakan tarif AS, dengan proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17% dan gangguan substansial pada sektor-sektor ekspor utama. Respons Indonesia yang meliputi diplomasi perdagangan, diversifikasi pasar ekspor, penguatan manufaktur domestik, dan reformasi regulasi mencerminkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan untuk transformasi struktural jangka panjang. Namun, keberhasilan strategi ini tergantung pada koordinasi yang efektif antar tingkat pemerintah, investasi publik yang cukup, dan partisipasi aktif dari sektor swasta dalam inovasi dan peningkatan daya saing.

Pada tingkat global, fragmentasi ekonomi yang terus berlanjut dan erosi multilateralisme perdagangan menunjukkan bahwa sistem perdagangan pasca-Perang Dunia II berada pada titik balik. Resolusi berkelanjutan terhadap ketegangan perdagangan global memerlukan pendekatan yang lebih kooperatif yang menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional yang sah dengan manfaat dari perdagangan terbuka yang saling menguntungkan. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, strategi yang efektif adalah memperkuat kapasitas domestik, memperdalam integrasi regional, dan tetap menjadi advokat untuk sistem perdagangan berbasis aturan yang adil di panggung multilateral global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, S. I., Cimino-Isaacs, C. D., & Sutter, K. M. (2024). *U.S. Trade Policy: Background and Current Issues*.
- Alvares, D., Pawdag¹, L., Yonathan, D., Dasong, A. K., Wantah, J. G., & Wuri, J. (2025). Education, Skilled Labour, And Per Capita Income In Indonesia. *IOSR Journal Of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 16(4), 1–6. <https://doi.org/10.9790/5933-1604050106>
- Bachtiar, R., Arum, D., Suci, A., & Piekarsa, J. (2025). *Responding to the 32% US Tariff_ Indonesia's Next Steps*. <https://www.Arma-Law.Com/News-Event/Newsflash/Responding-to-the-32-Us-Tariff-Indonesias-next-Steps>.
- Byrne, J. (2016). Improving the peer review of narrative literature reviews. *Research Integrity and Peer Review*, 1, 12. <https://doi.org/10.1186/s41073-016-0019-2>
- Chen, D. (2025). Protectionism in Modern Economic System: Evaluating the US Trade Policies and the Impacts on China and Canada. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278863713>

- Gagnon, J. E. (2025, February 24). *Why higher tariffs won't shrink the trade deficit*. <https://www.piie.com/Blogs/Realtime-Economics/2025/Why-Higher-Tariffs-Wont-Shrink-Trade-Deficit>.
- Galuh, M. C. (2025, April 8). *RI to initiate diplomatic efforts regarding US reciprocal tariffs* - ANTARA News [Broadcast].
- GEODIS. (2026, February 25). *U.S. Tariffs - Latest Client Updates*. <https://geodis.com/Us-En/Resources/Customs-Corner/Us-Tariffs-Client-Updates>. <https://geodis.com/us-en/resources/customs-corner/us-tariffs-client-updates>
- Hammond, K. E., & Burkhart, W. F. (2026). *Presidential 2025 Tariff Actions: Timeline and Status*. <https://crsreports.congress.gov>
- Handoyo, A., & Isnadi, Y. (2023). The insignificance of GDP growth rate to people's welfare: a political economy analysis of China's impressive GDP. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13, 217–232. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i2.10424>
- Harianto. (2025, April 26). *Market Diversification Pursued to Expand Export Reach: Ministry* [Broadcast]. <https://britcham.or.id/market-diversification-pursued-to-expand-export-reach-ministry/>
- Harithas, B., Meng, K., Brown, E., & Mouradian, C. (2025). *"Liberation Day" Tariffs Explained*. <https://www.csis.org/analysis/liberation-day-tariffs-explained>
- Hong, Z. (2025). On the Historical Origin and its Mirror: In Reality of United States Trade Law. *Revue Québécoise de Droit International*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:283638007>
- Huang, Y. (2025). Study on the Dynamics of China-US Economic and Trade Game and Reconstruction of International Law Order under Trump 2.0 New Deal. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:280361225>
- Koopman, R. (2025). The Likely Micro- and Macro-Economic Consequences of a Unilateral US Trade Policy. *World Trade Review*, 24(4), 446–462. <https://doi.org/10.1017/S1474745625101067>
- Koopman, R. B., & Tsigas, M. (2025). US trade conflict: Potential economic implications for the US and the global economy. *Journal of Policy Modeling*, 47(4), 785–804. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2025.06.013>
- Lectard, P. (2023). Manufacturing exports: A virtuous circle of industrialization or a lock-in development pattern? The case of the machinery and textiles sectors. *Structural Change and Economic Dynamics*, 65, 319–338. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.03.004>
- Liu, J. (2025). Analysis of the Impacts and Counterstrategies of the U.S.-China Trade War Based on David Ricardo's Model. *Finance & Economics*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:284082581>
- Lowell, M., Heeren, P., Angotti, J., Rodriguez-Johnson, L., Lowell, K., & Fisher, C. E. (2025, April 3). *U.S. imposes 10% baseline tariffs; higher reciprocal tariffs for targeted countries*. <https://www.tradecomplianceresourcehub.com/2025/04/03/u-s-imposes-10-baseline-tariffs-higher-reciprocal-tariffs-for-targeted-countries/>.
- Mckibbin, W. J., Noland, M., & Shuetime, G. (2025). *The global economic effects of Trump's 2025 tariffs*. www.piie.com
- Montes Ninaquispe, J. C., Arbulú Ballesteros, M., Valle, M., Morales, A., Cruz Salinas, L., Farfán-Chilicaus, G., Garcia, H., & Ernesto, J. (2024). Diversification of Export Markets: A Literature

- Review. *Journal of Educational and Social Research*, 14, 260. <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0137>
- Nathanael, M. (2025, March 8). *Indonesia's Ambiguous Future on Economic Diplomacy: BRICS, OECD, or CPTPP*. <https://ModernDiplomacy.Eu/2025/03/08/Indonesias-Ambiguous-Future-on-Economic-Diplomacy-Brics-Oecd-or-Cptpp/>.
- Purba, J., Mulyana, M., & Satria, W. (2025). Analyzing the Impact of Import Tariffs, Trade Dynamics, and Exchange Rates on Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13, 1215–1226. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i2.3005>
- Sarkar, S., & Bhatia, G. (2021). Writing and appraising narrative reviews. *Journal of Clinical and Scientific Research*, 10, 169. https://doi.org/10.4103/jcsr.jcsr_1_21
- Sukhera, J. (2022). Narrative Reviews in Medical Education: Key Steps for Researchers. *Journal of Graduate Medical Education*, 14(4), 418–419. <https://doi.org/10.4300/JGME-D-22-00481.1>
- UN Trade and Development (UNCTAD). (2024, December 31). *Transforming customs processes to drive trade efficiency worldwide*. <https://unctad.org/News/Transforming-Customs-Processes-Drive-Trade-Efficiency-Worldwide>.
- Zaye, E. (2025). The Role of Trade Tariff Policy on US Supply Chain Imbalance and Trade Deficits Reduction: Evidence from Trend and Univariate Analyses. *International Journal of Supply Chain and Logistics*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:279785726>
- Zirpoli, C. T. (2025). *Congressional and Presidential Authority to Impose Import Tariffs*. <https://crsreports.congress.gov>